https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah
https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2588

Open Access

SANG PENCERAH
Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton

E-ISSN: 2655-2906, P-ISSN: 2460-5697 Volume 9, No 2, Tahun 2023

Dampak Dari Abraham Accord bagi Palestina dan Pandangan Negara Islam Timur Tengah Mengenai Perjanjian Tersebut

LM Rezky Rafi Atallah Rahim[1*], Gonda Yumitro[1]

[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Malang, Indonesia
[*]Korespondensi: lmrezkyrafi@gmail.com

Info Artikel

Diterima 30 *Agustus 2022*

Disetujui 10 *April 2023*

Dipublikasikan 04 *Mei 2023*

Keywords: Abraham, Accord, Middle East, Normalization, Peace Studies, UAE

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY-SA 4.0)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Abraham Accords terhadap Palestina dan pandangan negara Islam Timur tengah terhadap perjanjian tersebut. Hal ini penting dan menarik karena Abraham Accord kesepakatan perdamaian dan normalisasi hubungan antara beberapa negara Timur Tengah dengan Israel, yang memberikan pengaruh terhadap peta politik regional. Pengumpulan data dalam peneitian ini dengan menggunakan Harzing Publish or Perish. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dikurangi, dan dianalisis menggunakan Nvivo 12 plus. Penulis menemukan bahwa Abraham Accord memberikan pengaruh positif bagi negara yang membangun kesepakatan dengan Israel. Meskipun demikian, kesepakatan ini merugikan Palestina karena memperkuat eksistensi Israel di Kawasan. Oleh karena itu, selain terdapat beberapa negara yang mendukung kesepakatan tersebut, juga terdapat beberapa negara yang menilai bahwa perjanjian ini tidak menguntungkan bagi Palestina, termasuk negara Islam lain khususnya di Kawasan Timur Tengah.

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Abraham Accords on Palestine and the views of Middle Eastern Islamic countries towards the agreement. This topic is important and exciting because the Abraham Accord is a peace agreement and the normalization of relations between several Middle Eastern countries and Israel, influencing the regional political map. Data collection in this article used Harzing Publish or Perished. The data collected was then classified, reduced and analyzed using Nvivo 12 plus. The authors found that the Abraham Accord positively influences countries that build agreements with Israel. However, it is detrimental to Palestine because it strengthens Israel's presence in the region. Therefore, besides several countries that support the agreement, there are also several countries that consider this agreement not beneficial for Palestine, including other Islamic countries, especially in the Middle East Region.

1. Pendahuluan

Perjanjian Abraham Accords merupakan kesepakatan perdamaian yang didorong oleh Presiden Donald Trump, untuk menormalkan relasi Israel dan UEA, pada tanggal 13 Agustus 2020 (Maital & Barzani, 2021). Perjanjian ini ditandatangani di Gedung putih Washington D.C, oleh Menlu UEA Abdullah bin Zayed, Menlu Bahrain Abdullatif bin Rasyid, dan PM Israel Benjamin Netanyahu (Singer, 2021). Sebelumnya, Israel juga melakukan hubungan normalisasi dengan beberapa negara Arab lainnya, seperti pada tahun 1979 pada Mesir, dan pada Yordania di tahun 1994. Sehingga pada tahun 2020, Uni Emirat Arab merupakan negara Arab ketiga dan Bahrain menjadi negara Arab keempat yang telah melakukan persetujuan untuk menciptakan relasi yang baik dengan Israel. Selama bertahun-tahun UEA telah berusaha untuk menyebarkan doktrin agama-politik yang ingin menjadikan perdamaian sebagai nilai Islam dan identitas nasional (Baqi, 2022).

Upaya ini telah membentuk citra International bahwa UEA merupakan negara yang melindungi kebebasan beragama, pluralisme, dan multikulturalisme. Proses normalisasi antara Israel dan UEA, yang didorong oleh Amerika ini, juga dibentuk dengan semangat rekonsiliasi atau pemulihan hubungan agama antara Muslim, Yahudi, dan Kristen (Singer, 2021). Kesepakatan ini diberi nama Abraham untuk menghormati bapak tiga agama monoteistik tersebut. Kemudian ada beberapa hal utama yang disepakati oleh Israel dan UEA dalam Perjanjian Abraham ini. Pertama, kedua negara sepakat untuk membangun hubungan diplomatik bilateral. Kedua, Amerika Serikat, Israel, dan UEA berencana untuk meluncurkan sebuah agenda strategis bagi kawasan Timur Tengah yang bertujuan untuk memperluas kerjasama diplomatik, baik dalam bidang perdagangan atau keamanan. Ketiga, negara Israel akan menunda rencana untuk melakukan ekspansi pada bagian West Bank, dan terakhir untuk memberikan hak warga Uni Emirat Arab untuk berkunjung atau melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur (Wicaksono, 2020). Kemudian respon negara-negara atau masyarakat sipil terhadap perjanjian ini juga beragam.

Banyak yang menyambut baik dan mendukung perjanjian ini. Seperti negara Kanada dan Amerika Serikat yang menganggap perjanjian ini akan menjadi langkah positif dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah (Syed & Ahmed, 2021). Ada juga beberapa kelompok atau masyarakat sipil, aktivis, di negara di Timur Tengah yang memprotes kesepakatan ini, seperti terdapat beberapa protes di Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Sebagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh Palestina, PLO bahkan menarik Dubes Palestina untuk Abu Dhabi dan menyerukan pertemuan konferensi tingkat tinggi (KTT) Liga Arab beserta OKI untuk menolak kesepakatan Abraham ini. Hal ini dikarenakan perjanjian Abraham ini berpengaruh terhadap hubungan antara Israel-Palestina. Selain itu, negara Iran dan Turki juga mengkritik kesepakatan ini, dan menuding UEA berkhianat terhadap Palestina (Yossef, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini lebih terfokus pada dampak Abraham Accords terhadap Palestina, dan bagaimana pandangan negara-negara Islam di Kawasan Timur Tengah terhadap kesepakatan tersebut.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode dokumentatif dengan berlandaskan studi literatur yang diperoleh dari buku, dokumen online seperti jurnal atau artikel terkait dengan perjanjian Abraham Accord dengan menggunakan Harzing Publish or Perish dan Google Scholar. Data-datanya dicari dengan menggunakan keywords Abraham Accord, dan dipilih berdasarkan kesesuaian penelitian dengan tema kesepakatan ini yang berkaitan dengan dampaknya dan pandangan dari negara-negara Islam di Kawasan Timur Tengah.

Data yang terkumpul kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dikurangi, dan dianalisis dengan menggunakanmenggunakan Nvivo 12 plus. Data PDF yang sudah diklasifikan dicoding, dan dibuatkan case untuk dianalisis dengan menggunakan fitur framework matrix. Data tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak Perjanjian Abraham Accord dan Dampak Bagi Palestina

Deklarasi atau kesepakatan Abraham Accord, merupakan sebuah pengakuan yang telah disepakati oleh negara Israel, dan beberapa negara-negara Islam lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Negara-negara tersebut menyatakan pentingnya untuk selalu menjaga serta memperkuat perdamaian di Timur Tengah, yang berlandaskan dari rasa saling pengertian, koeksistensi, rasa hormat untuk martabat dan kebebasan manusia. Setelah UEA dan Bahrain, Kesepakatan Abraham Accord dengan cepat juga membuat negara lain ikut bergabung. Seperti negara Sudan, pada bulan Oktober 2020 bergabung menjadi negara Arab ketiga yang menandatangani perjanjian, dan diikuti oleh Maroko pada bulan Desember (Guzansky & Feuer, 2021).

Penandatangan Kesepakatan Abraham Accord ini menjadi peristiwa penting bagi hubungan diplomatik negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pemulihan hubungan antara UEA dan Israel dinilai sangat luar biasa mengingat sejarah panjang permusuhan mereka atas hak-hak rakyat Palestina. Beberapa pihak memiliki tanggapan yang berbeda tentang kesepakatan Abraham Accords ini. Pihak yang memiliki pandangan realis menilai kesepakatan ini bermanfaat bagi Israel dan UEA, karena akan memudahkan kedua negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya atau memberikan manfaat pada bidang ekonomi, teknologi, dan manfaat strategis lainnya yang tentunya akan berpengaruh pada kawasan juga. Sedangkan pihak yang memiliki pandangan idealis meragukan jika kesepakatan ini akan membawa perdamaian, dan stabilitas kawasan atau kemakmuran bagi rakyat Palestina.

Secara keseluruhan, Kesepakatan Abraham Accord memiliki efek positif dan negatif pada hubungan di kawasan dan negara-negara di kawasan harus berusaha membangunnya dengan mencari solusi untuk Palestina. Dampak positif hanya bisa dirasakan oleh kedua negara yang melakukan perjanjian dan negatifnya adalah tidak ada pihak Palestina yang mengikuti penandatanganan ini. Oleh karena itu negara-negara islam lainnya khususnya negara Timur Tengah yang belum melakukan hubungan terhadap Israel menjadi geram dengan kesepakatan

ini. Perjanjian Abraham Accord dinilai hanya memikirkan kepentingan nasional UEA, Bahrain, dan Israel semata (Rimapradesi & Sahide, 2021).

Keuangan dan investasi, penerbangan sipil, visa dan layanan konsuler, inovasi, perdagangan dan hubungan ekonomi, kesehatan, Ilmu pengetahuan, teknologi, dan penggunaan luar angkasa secara damai, pariwisata, budaya dan olahraga, energi, lingkungan, pendidikan, pengaturan maritim, telekomunikasi dan pos, pertanian dan ketahanan pangan, air, kerjasama hukum. Kesepakatan tersebut memberikan beberapa manfaat bagi Israel untuk mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara islam seperti UEA dan Bahrain (Guzansky & Marshall, 2020). Hal ini dapat kita lihat dengan hadirnya kedutaan besar Israel di Abu Dhabi, dan juga hadir kedutaan pertama UEA di Israel tepatnya di Tel Aviv. Kemudian Hubungan Israel dan Bahrain juga semakin maju setelah adanya kesepakatan ini. Untuk pertama kalinya Menteri Luar Negeri Bahrain melakukan kunjungan resmi ke Israel pada November 2020. Setelah itu pada Maret 2021, Kementerian Luar Negeri Bahrain mengumumkan untuk membuka kedutaan mereka di Israel, yang mana merupakan duta besar pertama Bahrain untuk Israel.

Hubungan diplomatik ini kemudian memberikan manfaat bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan, seperti memudahkan mobilitas warga atau memungkinkan rute penerbangan antara Israel dan Bahrain, Israel dan Maroko, dan Israel dan Uni Emirat Arab, dimana beberapa dari penerbangan ini belum pernah diizinkan sebelumnya. Dan tercatat dalam empat bulan pertama setelah kesepakatan terjadi, lebih dari 130.000 orang Israel mengunjungi Uni Emirat Arab (Karataş & Uslu, 2022).

Kesepakatan ini membawa peluang ekonomi baru bagi negara yang terlibat dalam kesepakatan. Dapat kita lihat dari Uni Emirat Arab yang mengejar investasi yang signifikan di sektor strategis di Israel, termasuk energi, obat-obatan, teknologi, perawatan kesehatan (Dachtler, 2022). Menurut Sekretaris negara Amerika Serikat, Antony Blinken, pendalaman hubungan diplomatik melalui Abraham Accord ini dapat mengatasi tantangan yang memerlukan kerja sama antar negara, kesepakatan ini dapat mengurangi ketegangan regional, memerangi terorisme, dan mengurangi dampak krisis iklim.

Selain itu, hubungan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan normalisasi untuk merancang perbaikan dalam kehidupan masyarakat Palestina, serta membuat kemajuan yang pesat untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina. Jadi, walaupun hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan, normalisasi ini juga dinilai mengarah pada stabilitas yang lebih baik, karena lebih banyak kerja sama, dan kemajuan bersama untuk mencapai kepentingan atau hal-hal yang dibutuhkan oleh kawasan Timur Tengah saat ini. Selain berdampak kepada hubungan kerjasama di negara Timur Tengah, ternyata kesepakatan normalisasi ini juga menimbulkan perselisihan serta beberapa kecaman atau kritikan dari berbagai pihak. Misalnya negara Maroko yang menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel, menyampaikan ada salah satu negara yang memutuskan hubungan, dengan alasan Maroko menjalin hubungan dengan Israel.

3.2. Pandangan Negara Islam di Kawasan Timur Tengah Terhadap Perjanjian Abraham Accord

Agama Islam memiliki peran penting atau sebagai kunci di dalam wacana perpolitikan negara-negara dunia Arab atau Timur Tengah. Biasanya pihak-pihak yang berwenang memanfaatkan ideologi untuk mendapatkan dukungan rakyat, atau digunakan bagi landasan bagi tatanan sosial dan politik yang berlaku serta kebijakan rezim. Para pemimpin negara-negara Islam, biasanya menggunakan lembaga keagamaan yang didanai negara untuk mencegah pihak oposisi Islam dan mempersiapkan suatu landasan bagi langkah-langkah politik yang menimbulkan kontroversi internal dan eksternal.

Banyak orang di dunia Arab atau negara-negara Islam, masih menganggap permasalah di Palestina sebagai isu spiritual, mereka umumnya tidak menganggap sebagai masalah politik. Dalam kesepakatan ini banyak pihak menilai Negara Israel merasa dibenarkan, karena Israel dapat melakukan hubungan normalisasi dengan negara dunia Arab tanpa menyelesaikan klaim dari Palestina. Di sisi lain, kesepakatan ini merupakan salah satu perkembangan besar dalam politik Timur Tengah. Dimana Kesepakatan Abraham dinilai akan menumbuhkan perekonomian kawasan, meningkatkan kemajuan strategis, dan hubungan yang lebih kuat antara negara-negara dengan budaya beragam di Timur Tengah. Untuk menghindari suatu konflik dan lebih banyak kesengsaraan di kawasan itu, negara lain atau komunitas internasional harus segera mendorong Israel untuk mematuhi hak-hak Negara Palestina dan tentunya mematuhi hukum internasional.

Majelis Ijtihad terkemuka Palestina mengecam penyebutan kata “Abraham Accords”, yang mengacu kepada pakta menormalkan relasi Israel, UEA, dan Bahrain. Kata Pakta Abraham tersebut berasal dari nama pendiri 3 agama samawi yaitu, Yahudi, Kristen, serta Islam (Ariana, 2016). Pihak Palestina menganggap kesepakatan ini menguntungkan dan mempermudah penjajah serta menjadi suatu ancaman yang jelas bagi perjuangan Palestina, dan dalam mempertahankan Masjid al-Aqsa. Kemudian Palestinian Authority juga melarang setiap muslim yang datang untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa berdasarkan kesepakatan normalisasi Israel. PA khawatir bahwa kunjungan berdasarkan normalisasi ini akan membuat Israel memperkuat atau membentuk citranya sebagai negara yang mengizinkan kebebasan beragama, sehingga memperkuat Israel untuk menguasai tempat-tempat suci. Jadi, pihak otoritas Palestina tidak dapat menerima normalisasi ini. Hamas juga menganggap normalisasi ini sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina (Ma’oz, 2022).

Sebelum adanya Kesepakatan Abraham, terdapat Inisiatif Perdamaian Arab, yang mengharuskan normalisasi oleh negara Arab dengan Israel ditunda sampai Israel mencapai perdamaian dengan Palestina. Kemudian setelah adanya Perjanjian Abraham negara-negara seperti UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko sudah secara terbuka mengungkapkan hubungan diplomatik dengan Israel tanpa menunggu adanya sebuah kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Tentunya hal ini menyebabkan banyak negara-negara Islam yang mengecam negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut. Negara-negara yang kurang setuju dengan perjanjian ini misalnya ada Qatar, Turki, dan Iran (Dazi-Héni, 2020).

Menlu Qatar, yaitu Sheikh Mohammed Al-Thani tidak mempercayai pakta ini dapat menyudahi konflik serta isu perdamaian di Kawasan Timteng.Kebijakan dari

Menlu Qatar ini muncul saat konferensi keamanan global pada hari kedua yang bertepatan di Doha. Menlu Qatar juga mengatakan bahwa Qatar tidak melihat prospek untuk proses perdamaian timur tengah. Qatar juga merespon rasa kecewa dengan meningkatkan bantuan sebagai rasa simpati terhadap Palestina dengan memberikan distribusi bulanan sekitar $30 juta USD untuk penduduk di Gaza (Barakat & Masri, 2017).

Kemudian dari Negara Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan mengancam akan menutup kedutaan Turki di Abu Dhabi karena kesepakatan Abraham Accord. Kemudian ada Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu yang menilai bahwa negara-negara yang telah bergabung pada kesepakatan Abraham, telah kehilangan moral mereka dan mencoba melemahkan solidaritas regional. Turki memberikan respon terhadap hubungan normalisasi ini dengan mengambil tindakan yaitu dengan memberikan bantuan untuk memperkuat kekuatan militer Hamas.

Negara Iran juga kurang menyetujui hubungan normalisasi ini. Seperti Menteri Mohammed Javad Zarif, menyatakan bahwa Uni Emirat Arab sekarang menjadi mitra/teman bagi kejahatan Israel, dan menambahkan bahwasanya kesepakatan ini dapat menjadi ancaman terhadap keamanan yang ada di kawasan timur tengah serta bagi ancaman untuk dunia Islam. Selanjutnya pemimpin Iran sendiri, Ayatollah Ali Khamenei mengecam perbuatan UEA, dan mengatakan bahwa UEA telah "mengkhianati" Muslim dan Presiden Iran Rouhani memperingatkan apabila kesepakatan mempunyai tujuan untuk memperluas wilayah Israel, maka Iran akan memberikan sikap penangananya yang berbeda dari sebelumnya.

Menghadapi kritikan dari banyak pihak, UEA menanggapinya bahwa kesepakatan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui kutipan keputusan Dewan Fatwa Emirat atau Emirates Fatwa Council, yang merupakan otoritas agama tertinggi negara itu, dijelaskan bahwa perjanjian dengan Israel ini merupakan maslahat atau suatu kepentingan, suatu tindakan melindungi satu atau lebih tujuan fundamental syariah Islam. Uni Emirat Arab juga membenarkan tindakannya melakukan normalisasi dengan Israel dengan mengutip pada Islamic Precedents diantaranya Perjanjian Hudaibiyah oleh Nabi Muhammad dengan penyembah berhala di Mekah.

Pihak-pihak yang setuju dengan UEA juga menggunakan ayat-ayat yang menunjukan preferensi Islam untuk perdamaian, seperti QS. Al-Anfal:61 yang berbunyi *“Tetapi jika mereka lebih condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah SWT.”* Sedangkan, pihak yang menentang perjanjian ini juga menggunakan ayat Al-Quran untuk menyampaikan argumentasi mereka, seperti dengan Surah Al-Maidah:2 yang berbunyi *"Bekerja sama dalam kebenaran dan takwa, tetapi janganlah bekerja sama dalam dosa dan permusuhan”.* Kutipan ini digunakan untuk menentang hubungan UEA dengan Israel. Jadi UEA beranggapan bahwa kesepakatan ini konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi kerjasama antara orang-orang dari semua agama, dan dengan memperhatikan kemanusian dan persaudaraan. Perjanjian ini juga membantu memperkuat citra internasional UEA sebagai negara yang memperjuangkan pandangan perdamaian dan toleransi.

Selain negara-negara yang kurang menyetujui hubungan normalisasi ini, terdapat juga beberapa negara yang memberikan respon positif terhadap kesepakatan normalisasi ini, misalnya seperti Mesir, Yordania, dan Sudan. Mesir sendiri melalui Presiden El Sisi sagat menghargai kesepakatan ini sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas kawasan. Kemudian negara Yordania, melalui Menteri Luar Negeri Ayman Safadi, berharap kesepakatan Abraham Accords ini dapat mendorong negosiasi perdamaian Israel dan Palestina yang sempat terhenti. Selain itu, negara Sudan juga turut menyambut kesepakatan antara Israel dan UEA ini, dan berharap akan membantu menemukan solusi terbaik bagi perdamaian antara Israel dan Palestina.

Kesepakatan Abraham ini merupakan sebuah tanda mencairnya hubungan antara negara di dunia Arab dengan Israel yang telah lama berkonflik. Kemudian tujuan awal dari perjanjian ini, selain untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat, juga ada keinginan untuk menciptakan perubahan pada kawasan Timur Tengah yang dibangun atas perdamaian dan kemakmuran bagi kawasan. Manfaat yang diinginkan dari Kesepakatan Abraham Accord ini digambarkan sebagai maslahat, memberi mereka validasi agama, tetapi juga mencerminkan aspirasi politik, ekonomi, dan lain-lain. Apabila aspirasi tersebut dapat terwujud dan berkontribusi pada negara-negara dan masyarakat di kawasan itu, legitimasi politik dan agama, maka perdamaian Palestina dan Israel juga diyakini bisa terwujud. Jadi, kesepakatan ini menyoroti bagaimana pentingnya aspek agama, dan aktor seperti pemerintah, sipil, dan aktor agama di Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah diharapkan dapat berkembang dan memanfaatkan potensi positif yang ada dalam kesepakatan Abraham Accords. Cekungan Suci di Yerusalem yang secara eksplisit disebutkan dalam kesepakatan Abraham, juga harus dikembangkan, kemudian harus ada kerjasama antara negara-negara di kawasan, atau aktor-aktor agama dan internasional untuk menciptakan perdamaian dan tentunya harus bisa melibatkan pihak Palestina.

Permasalahan ini kami bisa melihat dua sisi, pertama dengan menggunakan teori Konstruktivis. Dikarenakan pada pandangan konstruktivisme, dalam melihat pola interaksi antara bangsa, tidak hanya dibentuk atas negara tersebut, akan tetapi juga dengan melihat beberapa unsur-unsur, seperti identitas, norma, dan budaya. Kedua dengan melihat dari sudut pandang islam yang baru pada melihat dunia, Islam memiliki sumber sendiri dalam melihat kasus hubungan internasional, yaitu dari Al-Qur'an yang merupakan asal segala ilmu, Hadits Rasulullah yang Shahih, dan Ijtihad para Ulama. Dalam pandangannya, islam memiliki karakteristik yang spesial. Oleh karena itu, dapat kami katakan bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, banyak sekali negara islam di timur tengah yang memberikan tanggapan mereka yang bermacam-macam, ada yang setuju dan ada yang menolak terhadap perjanjian ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan kesepakatan Abraham Accord memiliki efek positif dan negatif pada hubungan negara di tingkat regional. Semua negara di kawasan harus berusaha membangun hubungan diplomatik ini, memanfaatkan potensi yang ada dalam kesepakatan, dengan mencari solusi untuk Palestina juga. Normalisasi Abraham Accord ini mengarah pada stabilitas yang lebih baik, lebih banyak kerjasama antara negara-negara di

kawasan, dan kemajuan bersama untuk mencapai kepentingan atau hal-hal yang dibutuhkan oleh kawasan Timur Tengah saat ini.

Selain berdampak kepada hubungan kerjasama semua negara Islam, secara spesifik yang berada di kawasan timur tengah, ternyata kesepakatan normalisasi ini juga menimbulkan perselisihan, perbedaan pendapat, serta beberapa kecaman atau kritikan dari berbagai pihak dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Dikarenakan islam juga memiliki pandangan terhadap dunia internasional dengan sumber islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an, Hadits Rasulullah yang Shahih, dan Ijtihad para Ulama. Jadi tidak bisa kita pungkiri respon negara islam yang bermacam-macam terhadap perjanjian ini. Harus diketahui bahwa perjanjian ini tidak bisa menyelesaikan konflik Palestina dan Israel, karena tujuan perjanjian ini hanya menormalkan relasi antara Bahrain, UEA, dan Israel. Bukan sebagai resolusi konflik oleh karena itu bisa dikatakan bahwa perjanjian ini tidak menguntungkan bagi Palestina.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah mendukung dan memberikan fasilitas dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

Ariana, R. (2016). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Sebagai Manifestasi Politik Domestik: Pengaruh Kelompok Evangelis Terhadap Perdamaian Palestina-Israel. *Journal of International Relations*, *8*(4), 808–821.

Baqi, A. M. (2022). From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations. *Insignia: Journal of International Relations*, *9*(1), 80. https://doi.org/10.20884/1.ins.2022.9.1.4995

Barakat, S., & Masri, F. (2017). *Still in ruins : Reviving the stalled reconstruction of Gaza*. Brookings Institution.

Dachtler, P. (2022). From New to Normal_ Two Years after the Abraham Accords. *GIGA Focus Middle East*, *5*, 0–12.

Dazi-Héni, F. (2020). The Gulf States and Israel after the Abraham Accords. *Arab Reform Initiative*, *November*. https://www.arab-reform.net/publication/the-gulf-states-and-israel-after-the-abraham-accords/

Guzansky, Y., & Feuer, S. (2021). The Abraham Accords at One Year : Achievements, Challenges, and Recommendations for Israel. *The Institute for National Security Studies*, *May*, 1–17.

Guzansky, Y., & Marshall, Z. A. (2020). The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications. *Israel Journal of Foreign Affairs*, *14*(3), 379–389. https://doi.org/10.1080/23739770.2020.1831861

Karataş, İ., & Uslu, N. (2022). The Abraham Accords: Can Interculturalism Solve Grave Conflicts of the Middle East? *Journal of Ecumenical Studies*, *57*(2), 297–315. https://doi.org/10.1353/ecu.2022.0022.

Ma'oz, M. (2022). The Abraham Accords: Illusion and Reality. *Palestine - Israel Journal of Politics, Economics, and Culture*, *27*(3/4), 81–85.

Maital, S., & Barzani, E. (2021). The Economic Impact of the Abraham Accords After One Year: Passions vs. Interests. *Samual Neaman Institute*, *December*, 1–8.

Rimapradesi, Y., & Sahide, A. (2021). Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, *4*(March), 67–84. https://doi.org/10.33822/mjihi.v4i1.2673

Singer, J. (2021). The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco. *International Legal Materials*, *60*(3), 448–463. https://doi.org/10.1017/ilm.2021.18

Syed, S., & Ahmed, Z. (2021). Abraham Accords, Indo-Pacific Accord and the US-Led Nexus of Curtailment: Threat to Regional Security, and Joint Counter Strategy. *Policy Perspectives*, *18*(1), 25–52. https://doi.org/10.13169/polipers.18.1.0025

Wicaksono, R. M. T. A. D. (2020). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. *Jurnal ICMES*, *4*(2), 171–194. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.86

Yossef, A. (2021). The Regional Impact of the Abraham Accords. *Modern War Institute*, *20*(2), 1–17.